



HUKUM TATA NEGARA



Bambang Sugianto, S.H., M.Hum
Evi Oktarina, S.H., M.H.

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Bambang Sugianto dan Evi Oktarina

Hukum Tata Negara/Bambang Sugianto dan Evi Oktarina

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.

xiv, 146 hlm., 23 cm.

Bibliografi hlm. 141

ISBN 978-623-231-469-6

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2745 RAJ

Bambang Sugianto, S.H., M.Hum

Evi Oktarina, S.H., M.H.

HUKUM TATA NEGARA

Cetakan ke-1, September 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Hidayati

Setter : Jaenudin

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya v

KATA PENGANTAR PENULIS ix

DAFTAR ISI xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Sejarah Perkembangan Hukum Tata Negara 1

B. Pengertian Hukum Tata Negara 2

C. Ruang Lingkup dan Objek Hukum Tata Negara 6

D. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu-
Ilmu Lain 7

E. Asas-Asas Hukum Tata Negara 10

F. Reformasi dan Perkembangan Teori Hukum Tata
Negara 12

BAB 2 SUMBER HUKUM TATA NEGARA 15

A. Pengertian Sumber Hukum 15

B. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara 19

C. Pengundangan dan Berlakunya Undang-Undang 31

BAB 3 KONSTITUSI	33
A. Sejarah Konstitusi	33
B. Pengertian Konstitusi	40
C. Materi Muatan Konstitusi	42
D. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi	43
BAB 4 BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAH	47
A. Bentuk Negara	48
B. Bentuk Pemerintahan	56
C. Sistem Pemerintahan	57
D. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945	62
BAB 5 LEMBAGA NEGARA	69
A. Pengertian Lembaga Negara	69
B. Tujuan Lembaga-Lembaga Negara	71
BAB 6 DEMOKRASI DAN PEMILIHAN UMUM	83
A. Pengertian Demokrasi	83
B. Demokrasi di Era Modern	88
C. Pemilihan Umum	93
D. Perbedaan Antara Sistem Pemilu di Indonesia Dengan Negara Lainnya	103
BAB 7 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA	105
A. Perkembangan Konstitusi di Indonesia	107
B. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	109
C. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949	111
D. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950	113
E. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945	116

BAB 8 SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI	121
A. Pengertian Pemerintah Daerah	121
B. Fungsi Pemerintah Daerah	123
C. Asas Pemerintahan Daerah	136
DAFTAR PUSTAKA	141
BIODATA PENULIS	145

Bab 8 Sistem Pemerintahan Daerah dan Otonomi

Salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu mekanisme yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, sistem pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional. Otonomi daerah adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem pemerintahan daerah. Otonomi daerah berarti memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan-urusan daerahnya sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat daerah. Otonomi daerah juga bertujuan untuk memperkuat identitas dan budaya daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.

Otonomi daerah memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, otonomi daerah meliputi otonomi politik, otonomi ekonomi, otonomi sosial, dan otonomi budaya. Otonomi politik berarti memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memilih dan mengangkat pejabatnya sendiri. Otonomi ekonomi berarti memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi daerahnya sendiri. Otonomi sosial berarti memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan sosial di daerahnya. Otonomi budaya berarti memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan suatu konsep yang kompleks dan multidimensi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1989.
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2012.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta, Grafiti 1995.
- Ahmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Mahkamah, 2006.
- Azhary, *Ilmu Negara Pembahasan Buku Prof. Kranenbug*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, 1974.
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung, Penerbit Alumni, Cetakan ketiga, 1986.
- Anwar Arifin, *Pencitraan dalam Politik*, Jakarta, Pustaka Indonesia, 2006.

- Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung, CV. Armico, 1987.
- _____, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Indonesia. 1992.
- _____, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Hukum UII Press, 2003.
- _____, *Perkembangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Yogyakarta: FH-UII Press, 2004.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- C.F Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson, London, 1966.
- C.S.T, Kansil, , *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997.
- Dahlan Thaib dan Nimatul Huda, *Tiori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT, RajaGrafindo Persada, Hlm. 2006.
- Djokosoetono, *Hukum Tata Negara*, Himpunan oleh Harun Alrasid, Jakarta, Ghalia Indonesia. 1982.
- E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Timun Mas, 1960.
- H. Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama. 2012,
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Cetakan kedua, Sinar Grafika, 2011.
- Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2016.
- _____, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2017.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Konstitusi Pengertian dan Perkembangannya*, Pro-Justitia, 1987.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Cetakan kedua, PT RajaGrafindo Persada, 2013.

- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Cetakan ketiga belas, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan kelima, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Bekasi, Penerbit Jala Permata Aksara, 2004.
- Nur Yanto, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2017.
- Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta Penerbit Bina Aksara, 1982.
- Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2014
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Alumni, 1970.
- Philipus M Hadjon, , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada Universiity Press, 1993.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2014.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta, Cetakan kedua, Liberty Yogyakarta. 1980.
- Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Cetakan ketiga. Alumni Bandung. 1980.
- _____, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung, Mandar Madu, 1989.
- Samidjo, *Imu Negara*, Jakarta, Penerbit Amico, 1989.
- Saifudin, *Partisipasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama., Yogyakarta UUI Press, 2009.
- Sri Soemantri A., *Susunan Ketatanegaraan Menurut Nandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1993.

- _____. B, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987
- Sudikno Martokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia sejak 1942*, Yogyakarta, Liberti, 1983.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Cetakan keempat, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 1989.
- Zulkarnaen dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Ketetapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor. III/MPR/2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.